



**WALI NAGARI TAMBANG
KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

KEPUTUSAN WALI NAGARI TAMBANG
NOMOR : 30/Kpts/WN-TB/2025

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
NAGARI TAMBANG KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN

WALI NAGARI TAMBANG

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (good governance) melalui transparansi informasi dengan meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien, diperlukan adanya kebijakan dan strategi pengembangan dan penguatan pelayanan informasi dan dokumentasi bagi masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Pemerintahan Nagari Tambang Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan perlu membentuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Tambang Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Nagari Tambang Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Desa No 6 Tahun 2024 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1387), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2021 Tentang standar Layanan Informasi publik;
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari, (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 213);

12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 53 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
14. Keputusan bupati pesisir selatan nomor: 487/419/Kpts/BPT-PS/2022 tentang Standar layanan Informasi Publik Bagi penyandang Disabilitas Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 05 tahun 2024 tentang Standar harga pemerintah Nagari tahun anggaran 2024;
16. Peraturan Nagari Tambang Nomor 05 Tahun 2024 Tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2018 s/d 2026;
17. Peraturan Nagari Tambang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Nagari Tambang;
18. Peraturan Nagari Nomor 06 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tambang Tahun 2025;
19. Keputusan Wali Nagari Tambang Nomor 32 tahun 2024 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik di lingkungan Pemerintah Nagari Tambang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Kantor Nagari Tambang Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nagari Tambang sebagai Pengelola Layanan Informasi Publik melalui media yang meliputi desk layanan informasi, media online/website desa/nagari, media luar ruang (Baliho, poster, leaflet dan lainnya), media tatap muka dan media lainnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menyusun perumusan rencana kerja tahunan beserta pengembangan informasi publik desa/nagari sebagai publikasi pemerintah nagari/desa;

2. Menetapkan Peraturan Desa mengenai keterbukaan informasi publik;
3. Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Informasi Publik di Pemerintahan Desa/Nagari;
4. Menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi publik desa/nagari, termasuk papan pengumuman dan meja informasi;
5. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik (DIP) atas seluruh informasi publik desa/nagari yang dikelola;
6. Menyediakan dan memberikan layanan informasi publik yang dapat diakses dengan mudah, cepat, tepat dan cara sederhana;
7. melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan;
8. menolak permohonan Informasi Publik secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
9. mengelola dan mengaktifkan media online/website maupun sarana media lainnya sebagai sarana informasi desa;
10. Menyusun laporan tahunan layanan informasi publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi nagari/desa.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KEEMPAT : Keputusan Wali Nagari Tambang Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nagari Tambang ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Tambang
Pada tanggal : 2 Januari 2025

WALI NAGARI TAMBANG

AKBAR MALIK MUSTAFA, S.Kom



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI TAMBANG KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 30/Kpts/WN-TB/2025
TANGGAL : 21 April 2025
TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) NAGARI TAMBANG KECAMATAN IV
JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN.

Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Nagari Tambang
Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

No	JABATAN PPID	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Nagari	Wali Nagari
2	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Nagari	Sekretaris Nagari
3	Bidang – Bidang	
	a. Sekretariat	1. Yuni Syafitri
	b. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	1. Miko Supandra
	c. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	1. Silvi Septi Alfandi 2. Sriwita
	d. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	1. Nofrida Erianti 2. Indra

WALI NAGARI TAMBANG

AKBAR MALIK MUSTAFA, S.Kom

